



Strategi Ketahanan Pangan Melalui Integrasi Kapabilitas Militer dan Pemberdayaan Masyarakat

Ahmad Budiman¹ Martinus Dwi Arjanto Widodo² Slamet Sarjianto³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Indonesia^{1,2,3}

Email: ahmadbudiman090909@gmail.com¹ mailto.martindaw589@gmail.com
slametsarjianto2021@gmail.com²

Abstrak

Ketahanan pangan berkembang menjadi salah satu komponen strategis dalam mendukung ketahanan wilayah dan pertahanan negara karena ancaman keamanan semakin bersifat multidimensi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi satuan teritorial dalam mendukung ketahanan pangan serta kesiapan operasi darat melalui integrasi kapabilitas militer, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi multiaktor. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada Kodim 1302/Minahasa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi dengan melibatkan unsur TNI AD, pemerintah daerah, kelompok tani, akademisi, dan sektor swasta. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan dukungan NVivo melalui proses pengkodean dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kodim berperan sebagai fasilitator, dinamisator, dan akselerator melalui pendampingan petani, optimalisasi lahan, pemanfaatan alsintan, distribusi pangan, dan komunikasi sosial Babinsa. Strategi tersebut memperkuat ketahanan pangan, stabilitas wilayah, dan kesiapan operasi darat melalui keseimbangan Ends, Ways, dan Means.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat, Satuan Teritorial, Pertahanan Wilayah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek strategis dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat dan ketahanan nasional. Perubahan lingkungan strategis menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan negara tidak lagi terbatas pada ancaman militer konvensional, tetapi telah berkembang menjadi ancaman multidimensi yang mencakup krisis pangan, perubahan iklim, gangguan rantai pasok, konflik sumber daya, serta ketidakstabilan sosial. Dalam kondisi tersebut, pangan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu unsur yang dapat memengaruhi stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Negara dengan sistem pangan yang kuat memiliki kemampuan lebih besar dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan mengurangi kerentanan terhadap berbagai tekanan eksternal maupun internal (Asmara & Mutiasari, 2012; Ali et al., 2022). Oleh karena itu, ketahanan pangan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh.

Perubahan karakter ancaman tersebut turut mendorong perubahan paradigma penyelenggaraan pertahanan. Pertahanan negara tidak lagi hanya berorientasi pada kemampuan menghadapi agresi bersenjata, tetapi juga membutuhkan kemampuan untuk menghadapi ancaman nonmiliter yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, keterlibatan institusi pertahanan dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional memiliki landasan dalam konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pelaksanaan OMSP memberikan ruang bagi TNI untuk mendukung pemerintah dalam menghadapi berbagai persoalan strategis yang tidak selalu berbentuk ancaman militer, termasuk penanggulangan bencana, pemberdayaan wilayah, penguatan kapasitas masyarakat, dan dukungan terhadap ketahanan pangan (Napitupulu, 2024; Kusendarto & Maswir, 2025). Kapabilitas organisasi militer berupa struktur komando yang

jelas, disiplin personel, kemampuan mobilisasi, serta keberadaan satuan hingga tingkat wilayah menjadi sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah secara efektif.

Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam mempertahankan keberlanjutan sistem pangan nasional. Pertumbuhan penduduk, perubahan penggunaan lahan, perubahan iklim, kebutuhan konsumsi yang meningkat, serta dinamika geopolitik global dapat memberikan tekanan terhadap ketersediaan dan distribusi pangan (Kartikasari, 2024). Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga mencakup ketersediaan sarana produksi, infrastruktur pertanian, distribusi, stabilitas harga, serta kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya pangan. Pembangunan ketahanan pangan karena itu membutuhkan keterpaduan kebijakan dan kolaborasi berbagai aktor. Pemerintah daerah, kelompok tani, akademisi, sektor swasta, masyarakat, dan institusi pertahanan memiliki kapasitas yang berbeda dan dapat saling melengkapi dalam membangun sistem pangan berbasis wilayah (Kurniasih & Umar, 2022; Wibowo, 2020). Dalam konteks tersebut, TNI Angkatan Darat memiliki posisi strategis melalui sistem pembinaan teritorial yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia. Struktur komando kewilayahan memungkinkan satuan teritorial berinteraksi secara langsung dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Komando Distrik Militer (Kodim) merupakan salah satu unsur penting dalam struktur tersebut karena memiliki fungsi pembinaan wilayah dan kemampuan membangun komunikasi serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Keberadaan Bintara Pembina Desa (Babinsa) semakin memperkuat kemampuan satuan teritorial dalam menjangkau masyarakat pada tingkat desa. Babinsa tidak hanya menjalankan fungsi komunikasi sosial, tetapi juga dapat menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan program di lapangan (Aggasi & Ningtiyas, 2019; Kamara et al., 2021; Zulkifli, 2022).

Sejumlah penelitian telah menunjukkan adanya hubungan antara pembinaan teritorial, pemberdayaan masyarakat, dan program ketahanan pangan. Nabawi (2016) mengkaji pelaksanaan fungsi teritorial TNI AD dalam mendukung program swasembada pangan. Susanto dan Putri (2019) menunjukkan peran TNI dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru, sedangkan Alita et al. (2019) mengkaji peran Kodim dalam mendorong keterlibatan generasi muda pada sektor pertanian. Penelitian lain menempatkan komando kewilayahan sebagai salah satu unsur yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan melalui pendekatan berbasis wilayah (Zulkifli, 2022). Sementara itu, Herjito dan Setiawan (2021) menunjukkan bahwa pengembangan komoditas pangan membutuhkan strategi yang memperhatikan aspek produksi, ekonomi, dan tata kelola secara terpadu. Kajian mengenai ketahanan pangan juga terus berkembang dengan memasukkan dimensi teknologi, perubahan lingkungan, dan kapasitas sumber daya manusia. Wibowo (2020) menekankan pentingnya pembangunan ekonomi pertanian berbasis digital dalam mendukung ketahanan pangan. Hidayat dan Radyawanto (2025) mengkaji pengembangan batalyon infanteri teritorial pembangunan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Muda et al. (2026) juga menunjukkan pentingnya sinergi pembinaan teritorial antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan. Perkembangan kajian tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan pangan semakin dipahami sebagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan koordinasi antara aktor negara dan masyarakat.

Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menghubungkan strategi satuan teritorial, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi multiaktor, dan kesiapan operasi darat masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak menempatkan ketahanan pangan dalam perspektif produksi pertanian, pembangunan ekonomi, kebijakan

pangan, atau pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, aspek bagaimana sumber daya dan struktur komando teritorial digunakan untuk mendukung ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi pertahanan masih belum banyak dibahas secara komprehensif. Padahal, ketahanan wilayah merupakan salah satu kondisi penting yang dapat memengaruhi kemampuan pertahanan dalam menghadapi dinamika ancaman nonmiliter. Dengan demikian, terdapat gap penelitian pada integrasi antara dimensi ketahanan pangan, strategi pertahanan wilayah, dan kesiapan operasi darat dalam satu kerangka analisis. Kesenjangan tersebut menjadi semakin penting apabila dilihat dari karakteristik wilayah Minahasa. Kodim 1302/Minahasa memiliki wilayah tanggung jawab yang mencakup Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kota Tomohon. Wilayah tersebut memiliki karakter geografis dan sosial yang beragam serta memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap struktur ekonomi wilayah, sehingga keberlanjutan produksi pangan memiliki hubungan dengan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas wilayah. Kondisi tersebut menjadikan Kodim 1302/Minahasa sebagai konteks yang relevan untuk menganalisis bagaimana pembinaan teritorial dapat diintegrasikan dengan program ketahanan pangan dan kepentingan pertahanan.

Untuk menganalisis hubungan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif strategi Ends, Ways, dan Means. Kerangka ini digunakan untuk melihat keterkaitan antara tujuan strategis yang hendak dicapai, cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, dan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks penelitian, aspek Ends berkaitan dengan tujuan memperkuat ketahanan pangan, stabilitas wilayah, dan kesiapan operasi darat. Aspek Ways diwujudkan melalui pembinaan teritorial, pendampingan kelompok tani, optimalisasi lahan, komunikasi sosial, serta kolaborasi lintas sektor. Sementara itu, aspek Means mencakup personel Babinsa, struktur Kodim dan Koramil, jaringan sosial masyarakat, sarana pendukung, serta dukungan dari pemerintah daerah dan aktor lainnya. Pendekatan tersebut memungkinkan strategi ketahanan pangan dianalisis tidak hanya berdasarkan hasil produksi, tetapi juga berdasarkan keselarasan tujuan, metode, dan sumber daya. Selain perspektif Ends, Ways, dan Means, penelitian ini menggunakan perspektif jejaring aktor untuk memahami hubungan antara institusi militer, pemerintah daerah, kelompok tani, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Ketahanan pangan pada tingkat wilayah tidak dapat dibangun hanya melalui satu institusi karena setiap aktor memiliki sumber daya, kewenangan, dan kemampuan yang berbeda. Kodim memiliki keunggulan dalam jaringan kewilayahan dan komunikasi sosial, pemerintah daerah memiliki kewenangan kebijakan dan dukungan pembangunan, kelompok tani memiliki pengalaman langsung dalam produksi pangan, akademisi dapat memberikan dukungan pengetahuan dan inovasi, sedangkan sektor swasta dapat berkontribusi terhadap distribusi dan rantai pasok. Integrasi berbagai aktor tersebut membentuk pola kolaborasi yang menjadi bagian penting dari strategi ketahanan pangan berbasis wilayah.

Gap penelitian dalam kajian ini terletak pada belum optimalnya pengintegrasian perspektif ketahanan pangan dengan strategi pertahanan wilayah melalui analisis hubungan antara tujuan strategis, metode pelaksanaan, sumber daya teritorial, dan jejaring aktor. Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi pertahanan berbasis wilayah dengan menempatkan Kodim sebagai aktor penghubung antara kapabilitas militer, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola multiaktor. Pendekatan tersebut memberikan perspektif bahwa kontribusi satuan teritorial terhadap ketahanan pangan tidak semata-mata diukur dari keterlibatan personel dalam kegiatan pertanian, tetapi dari kemampuannya membangun sinergi sumber daya dan meningkatkan ketahanan wilayah yang mendukung kesiapan operasi darat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan studi pertahanan yang menghubungkan ancaman

nonmiliter, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan latar belakang, state of the art, dan gap penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi satuan teritorial dalam mendukung ketahanan pangan sebagai bagian dari penguatan ketahanan wilayah dan kesiapan operasi darat. Analisis difokuskan pada pelaksanaan program ketahanan pangan, peran dan pembinaan personel teritorial khususnya Babinsa, pola kolaborasi antara TNI dan aktor nonmiliter, serta keselarasan tujuan, cara, dan sumber daya melalui pendekatan *Ends, Ways, dan Means*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai model keterlibatan satuan teritorial yang mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung sistem pertahanan berbasis wilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis strategi satuan teritorial dalam mendukung program ketahanan pangan sebagai bagian dari penguatan ketahanan wilayah dan kesiapan operasi darat. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam fenomena keterlibatan institusi pertahanan dalam menghadapi isu keamanan nonkonvensional melalui perspektif aktor yang terlibat secara langsung. Studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman kontekstual mengenai implementasi strategi Kodim 1302/Minahasa dalam membangun sinergi antara sumber daya militer, pemerintah daerah, dan masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu pelaksanaan program ketahanan pangan, pembinaan personel komando teritorial, serta formulasi strategi melalui pendekatan tujuan, cara, dan sumber daya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap berbagai aktivitas yang berkaitan dengan program ketahanan pangan. Informan penelitian melibatkan unsur satuan teritorial, pemerintah daerah, kelompok tani, akademisi, serta pemangku kepentingan lain yang memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan program. Pemilihan informan dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap fenomena yang dikaji.

Data penelitian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tahapan pengumpulan data, penyajian data, analisis, serta penarikan kesimpulan secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola hubungan, kategori temuan, serta makna strategis dari setiap informasi yang dikumpulkan. Proses analisis juga dilakukan dengan pendekatan pengkodean untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan peran satuan teritorial, pembinaan personel, kolaborasi lintas sektor, dan kontribusi terhadap kesiapan operasi darat. Pengolahan data didukung dengan penggunaan perangkat lunak NVivo untuk membantu proses organisasi data, klasifikasi informasi, serta visualisasi hubungan antarvariabel penelitian. Validitas data diperkuat melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi metode, dan konfirmasi hasil kepada informan terkait guna memastikan akurasi interpretasi penelitian. Kerangka analisis penelitian menggunakan integrasi teori strategi *Ends, Ways, dan Means* serta perspektif jejaring aktor untuk menjelaskan bagaimana sumber daya pertahanan dapat dikembangkan dalam mendukung agenda ketahanan pangan. Pendekatan *Ends, Ways, dan Means* digunakan untuk memahami keselarasan antara tujuan strategis yang ingin dicapai, metode implementasi yang diterapkan, dan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh komando teritorial. Sementara itu, perspektif jejaring aktor digunakan untuk menganalisis hubungan antara TNI, pemerintah daerah, masyarakat, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam membentuk ekosistem ketahanan pangan. Analisis terhadap hubungan antaraktor dilakukan untuk mengidentifikasi pola koordinasi, pembagian peran, serta kontribusi masing-masing aktor terhadap keberhasilan program.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Ketahanan Pangan Kodim 1302/Minahasa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Kodim 1302/Minahasa merupakan bagian dari implementasi fungsi pertahanan berbasis wilayah. Kodim 1302/Minahasa berada di bawah Korem 131/Santiago dan Kodam XIII/Merdeka dengan wilayah tanggung jawab meliputi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kota Tomohon. Wilayah tersebut memiliki karakter geografis yang beragam, meliputi dataran tinggi, pegunungan, kawasan pesisir, wilayah danau, serta daerah pertanian. Kondisi tersebut menjadikan potensi sumber daya lokal sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksanaan strategi ketahanan pangan wilayah. Sektor pertanian memiliki posisi penting dalam perekonomian wilayah penelitian. Pada tahun 2024, sektor pertanian Kabupaten Minahasa memberikan kontribusi sebesar Rp6,41 triliun atau 25,47% terhadap PDRB. Kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Minahasa Selatan mencapai 33,25%, sedangkan Kabupaten Minahasa Tenggara sekitar 38%. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian memiliki hubungan erat dengan kehidupan ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu sumber daya strategis wilayah. Pelaksanaan program ketahanan pangan dilakukan melalui pendampingan kelompok tani, pengelolaan lahan tidur, pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), gerakan tanam padi dan jagung, Gerakan Pangan Murah, serta dukungan distribusi pangan. Hasil wawancara dengan berbagai aktor menunjukkan bahwa Kodim berkembang sebagai fasilitator dan akselerator program pangan daerah. Pengolahan data menggunakan NVivo 12 Plus terhadap transkrip wawancara menghasilkan 64 *node* awal melalui proses *open coding*. Data tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema yang berkaitan dengan peran satuan teritorial, pembinaan personel, pemberdayaan masyarakat, kolaborasi lintas sektor, dan kontribusi terhadap kesiapan operasi darat.

Tabel 1. Klaster Strategi Ketahanan Pangan Kodim 1302/Minahasa

Klaster Strategi	Bentuk Implementasi	Dampak Strategis
Kelembagaan	Koordinasi Kodim, pemerintah daerah, kelompok tani, akademisi, dan sektor swasta	Penguatan tata kelola ketahanan pangan
Pemberdayaan masyarakat	Pendampingan Babinsa, penyuluhan, dan penguatan kelompok tani	Peningkatan kapasitas masyarakat desa
Produksi pangan	Tanam padi dan jagung, optimalisasi lahan tidur, serta pemanfaatan alsintan	Peningkatan ketersediaan pangan lokal
Ekonomi dan pasar	Gerakan Pangan Murah, distribusi pangan, dan stabilisasi harga	Menekan potensi kerawanan sosial akibat pangan
Ekologi dan lingkungan	Pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lahan	Mendukung pertahanan berbasis lingkungan
Pertahanan wilayah	Pembinaan teritorial dan OMSP	Mendukung kesiapan operasi darat

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan Kodim 1302/Minahasa mencakup aspek kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, produksi pangan, ekonomi dan pasar, ekologi dan lingkungan, serta pertahanan wilayah. Setiap aspek memiliki bentuk implementasi dan dampak strategis yang berbeda, tetapi seluruhnya berhubungan dalam membentuk ketahanan pangan berbasis wilayah.

Peran Babinsa dalam Pelaksanaan Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Babinsa merupakan aktor sentral dalam implementasi strategi ketahanan pangan pada tingkat masyarakat. Hampir seluruh informan

menempatkan Babinsa sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah, kebutuhan petani, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Babinsa melaksanakan pendampingan kegiatan tanam, membantu pemanfaatan alsintan, mengorganisasi gotong royong masyarakat, memberikan dukungan komunikasi sosial, serta menyampaikan permasalahan petani kepada instansi terkait. Dalam perspektif *Ends, Ways, and Means*, Babinsa merupakan bagian dari unsur *Means* atau sumber daya strategis yang memungkinkan metode pelaksanaan strategi berjalan hingga tingkat masyarakat. Pembinaan personel dilakukan melalui peningkatan kemampuan komunikasi sosial, pendampingan masyarakat, pemahaman pertanian, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Personel juga memperoleh penguatan kemampuan dalam budi daya pertanian, pemanfaatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan, dan penggunaan alat mesin pertanian.

Kolaborasi Antaraktor

Hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi antara Kodim, pemerintah daerah, kelompok tani, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan program ketahanan pangan. Kodim berfungsi sebagai fasilitator yang mempercepat koordinasi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah menyediakan kebijakan dan dukungan teknis, kelompok tani menjadi pelaksana produksi pangan, akademisi memberikan kontribusi pengetahuan dan inovasi, sedangkan sektor swasta mendukung rantai pasok dan keberlanjutan ekonomi. Analisis NVivo menunjukkan bahwa tema kolaborasi lintas sektor muncul secara konsisten dalam hasil wawancara. Pola tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ketahanan pangan tidak hanya bertumpu pada struktur komando, tetapi juga pada hubungan antarpemangku kepentingan. Kelompok tani menjadi aktor utama produksi karena memiliki pengalaman langsung mengenai kondisi lahan, komoditas, dan dinamika pasar.

Tantangan Ketahanan Pangan

Hasil wawancara dengan kelompok tani menunjukkan bahwa komoditas utama yang dikembangkan di wilayah penelitian masih didominasi oleh padi, jagung, dan kedelai (PAJALE). Padi menjadi komoditas utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan konsumsi dan pendapatan petani, sedangkan jagung berkembang sebagai komoditas alternatif dengan nilai ekonomi dan permintaan pasar yang relatif stabil. Produksi pangan masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain perubahan cuaca, keterbatasan air irigasi, gangguan hama tanaman, ketersediaan pupuk, perubahan penggunaan lahan, serta minimnya regenerasi petani. Kehadiran Babinsa membantu mempercepat komunikasi antara permasalahan yang ditemukan di lapangan dengan instansi terkait.

Tabel 2. Tantangan Ketahanan Pangan dan Respons Strategis

Permasalahan Lapangan	Dampak terhadap Petani	Respons Strategis
Alih fungsi lahan	Berkurangnya area produksi pangan	Optimalisasi lahan tidur
Kerusakan irigasi	Produktivitas tidak maksimal	Koordinasi perbaikan infrastruktur
Keterbatasan pupuk	Biaya produksi meningkat	Pendampingan distribusi dan koordinasi instansi
Serangan hama	Risiko gagal panen	Penyuluhan dan penguatan kapasitas petani
Minimnya regenerasi petani	Penurunan SDM pertanian	Edukasi dan pemberdayaan generasi muda

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Tabel 2 menunjukkan bahwa tantangan ketahanan pangan berasal dari berbagai aspek, mulai dari lahan dan infrastruktur sampai sumber daya manusia. Respons terhadap persoalan tersebut dilakukan melalui optimalisasi lahan, koordinasi perbaikan infrastruktur, pendampingan distribusi, penyuluhan, dan pemberdayaan generasi muda.

Analisis Strategi *Ends-Ways-Means*

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara tujuan strategis, metode pelaksanaan, dan sumber daya yang digunakan Kodim 1302/Minahasa. *Ends* diarahkan pada ketahanan pangan, stabilitas wilayah, dan kesiapan operasi darat. *Ways* diwujudkan melalui pembinaan teritorial, pendampingan petani, optimalisasi lahan, komunikasi sosial, dan koordinasi lintas sektor. *Means* mencakup Babinsa, struktur Kodim, jaringan Koramil, hubungan sosial masyarakat, serta dukungan aktor eksternal.

Tabel 3. Analisis Strategi *Ends-Ways-Means*

Unsur Strategi	Implementasi Kodim 1302/Minahasa	Orientasi Hasil
Ends (Tujuan)	Ketahanan pangan, stabilitas wilayah, dan kesiapan operasi darat	Ketahanan nasional
Ways (Cara)	Pembinaan teritorial, pendampingan petani, dan kolaborasi multiaktor	Penguatan kapasitas wilayah
Means (Sarana)	Babinsa, Koramil, jaringan sosial, dan alsintan	Efektivitas implementasi program

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Tabel 3 menunjukkan bahwa ketiga unsur strategi saling berkaitan. Tujuan strategis membutuhkan cara pelaksanaan yang tepat dan sumber daya yang memadai. Kekuatan utama Kodim terletak pada jaringan kewilayahan yang memungkinkan pelaksanaan strategi hingga tingkat desa.

Model Konseptual Strategi Ketahanan Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan berbasis satuan teritorial mengintegrasikan kapabilitas militer, pemberdayaan masyarakat, dan jejaring kelembagaan. Kapabilitas militer diwujudkan melalui struktur Kodim, Koramil, dan Babinsa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui penguatan kelompok tani, pendampingan produksi pangan, pemanfaatan lahan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Jejaring kelembagaan dibangun melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas masyarakat.

Tabel 4. Model Konseptual Ketahanan Pangan sebagai Strategi Pertahanan Wilayah

Komponen Model	Aktor Utama	Bentuk Implementasi	Hasil Strategis
Kapabilitas militer	Kodim, Koramil, Babinsa	Pembinaan teritorial, komunikasi sosial, pendampingan lapangan	Kesiapan wilayah
Pemberdayaan masyarakat	Kelompok tani dan masyarakat desa	Produksi pangan, optimalisasi lahan, gotong royong	Ketahanan pangan lokal
Tata kelola pemerintah	Pemerintah daerah dan dinas teknis	Kebijakan, infrastruktur, bantuan pertanian	Keberlanjutan program
Inovasi pengetahuan	Akademisi dan penyuluh	Kajian, teknologi, dan pelatihan	Peningkatan produktivitas
Dukungan ekonomi	Swasta dan pelaku usaha	Distribusi dan rantai pasok	Stabilitas ekonomi pangan

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2026)

Tabel 4 menunjukkan bahwa ketahanan pangan wilayah dibangun melalui hubungan antara berbagai aktor dan sumber daya. Interaksi tersebut menghasilkan penguatan ketahanan pangan yang kemudian berdampak pada stabilitas wilayah.

Discussion

Strategi Ketahanan Pangan sebagai Penguatan Ketahanan Wilayah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi ketahanan pangan Kodim 1302/Minahasa memiliki dimensi yang lebih luas daripada peningkatan produksi pertanian. Program

pendampingan kelompok tani, optimalisasi lahan, pemanfaatan alsintan, Gerakan Pangan Murah, dan dukungan distribusi pangan menunjukkan adanya hubungan antara pemberdayaan masyarakat dengan penguatan ketahanan wilayah. Posisi tersebut penting karena sektor pertanian memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian wilayah penelitian, sehingga gangguan terhadap produksi dan distribusi pangan dapat memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Wibowo (2020) yang menempatkan pembangunan ekonomi pertanian sebagai salah satu bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan. Kurniasih dan Umar (2022) juga menunjukkan bahwa penguatan kebijakan berbasis wilayah memiliki hubungan dengan efektivitas ketahanan wilayah. Dalam konteks penelitian ini, peran Kodim terlihat melalui kemampuannya menghubungkan program pemerintah dengan kondisi masyarakat sampai tingkat desa.

Peran Babinsa dalam Pemberdayaan Masyarakat

Babinsa memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Babinsa menjalankan pendampingan tanam, membantu pemanfaatan alsintan, mengorganisasi gotong royong, melaksanakan komunikasi sosial, dan menyampaikan persoalan petani kepada instansi terkait. Temuan tersebut sejalan dengan Kamara et al. (2021) yang menunjukkan peran Babinsa dalam mendukung swasembada pangan melalui keterlibatan langsung di masyarakat. Aggasi dan Ningtiyas (2019) juga menunjukkan bahwa komunikasi militer menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program swasembada pangan di wilayah Koramil. Dalam penelitian ini, fungsi komunikasi sosial Babinsa terlihat lebih luas karena menjadi sarana untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan aktor pemerintah dan nonmiliter lainnya. Pembinaan kemampuan Babinsa juga menjadi bagian penting dari strategi. Kemampuan komunikasi sosial, pemahaman pertanian, pengelolaan lahan, penggunaan teknologi, dan koordinasi menunjukkan bahwa tugas teritorial membutuhkan personel yang mampu menghadapi persoalan nonmiliter secara adaptif. Temuan ini memperlihatkan bahwa sumber daya manusia menjadi bagian penting dari unsur *Means* dalam strategi *Ends-Ways-Means*.

Kolaborasi Multiaktor dalam Ketahanan Pangan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ketahanan pangan dibangun melalui hubungan antara aktor militer dan nonmiliter. Kodim berfungsi sebagai fasilitator, pemerintah daerah memberikan dukungan kebijakan dan teknis, kelompok tani menjalankan produksi, akademisi memberikan pengetahuan dan inovasi, sedangkan sektor swasta mendukung rantai pasok. Pola tersebut sejalan dengan Herjito dan Setiawan (2021) yang menekankan pentingnya pendekatan strategis dan terpadu dalam pengembangan komoditas pangan. Perbedaannya, penelitian ini menghubungkan pola kolaborasi tersebut dengan kepentingan pertahanan wilayah. Dengan demikian, ketahanan pangan tidak hanya dilihat sebagai persoalan produksi dan ekonomi, tetapi juga sebagai hasil dari koordinasi sosial dan kelembagaan. Muda et al. (2026) juga menekankan pentingnya sinergi pembinaan teritorial antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan. Temuan penelitian pada Kodim 1302/Minahasa memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan keterlibatan kelompok tani, akademisi, dan sektor swasta dalam membentuk jejaring ketahanan pangan.

Analisis Ends-Ways-Means

Analisis *Ends-Ways-Means* menunjukkan bahwa strategi Kodim 1302/Minahasa memiliki keterkaitan antara tujuan, cara, dan sarana. *Ends* berupa ketahanan pangan, stabilitas wilayah, dan kesiapan operasi darat. *Ways* diwujudkan melalui pembinaan teritorial, pendampingan petani, optimalisasi sumber daya lokal, komunikasi sosial, dan kolaborasi lintas sektor. *Means*



terdiri atas Babinsa, Koramil, jaringan sosial, alsintan, serta dukungan aktor eksternal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan strategi tidak hanya berasal dari jumlah sumber daya, tetapi dari kemampuan menghubungkan sumber daya tersebut dengan tujuan dan metode yang tepat. Jaringan kewilayahan menjadi keunggulan Kodim karena memungkinkan implementasi strategi sampai tingkat desa. Posisi Babinsa sebagai *Means* memperlihatkan bahwa sumber daya manusia dan jaringan sosial merupakan bagian penting dari efektivitas strategi.

Ketahanan Pangan dan Kesiapan Operasi Darat

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan strategis antara stabilitas pangan dan kesiapan operasi darat. Kesiapan operasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal satuan militer, tetapi juga oleh kondisi lingkungan sosial dan ekonomi wilayah. Ketahanan pangan yang lebih baik dapat mendukung stabilitas masyarakat, sedangkan gangguan pangan dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan keamanan. Napitupulu (2024) menempatkan ketahanan pangan dalam konteks sekuritisasi pangan nasional dan fungsi OMSP TNI. Perspektif tersebut mendukung temuan penelitian bahwa isu pangan dapat memiliki dimensi pertahanan ketika gangguan terhadap sistem pangan berpotensi memengaruhi stabilitas nasional. Purify et al. (2024) juga menunjukkan bahwa perubahan lingkungan dan risiko yang ditimbulkannya memiliki keterkaitan dengan kesiapsiagaan pertahanan Indonesia. Dalam konteks tersebut, kegiatan pendampingan pertanian, stabilisasi distribusi pangan, dan penguatan hubungan dengan masyarakat dapat menjadi mekanisme untuk membangun kondisi wilayah yang lebih siap menghadapi situasi krisis.

Tantangan dan Keseimbangan Peran Militer-Sipil

Penelitian menemukan bahwa pelaksanaan strategi ketahanan pangan masih menghadapi persoalan alih fungsi lahan, kerusakan irigasi, keterbatasan pupuk, serangan hama, perubahan cuaca, dan rendahnya regenerasi petani. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan membutuhkan pendekatan lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pengerahan personel militer. Suryana (2014) menjelaskan bahwa pembangunan ketahanan pangan berkelanjutan menghadapi tantangan yang membutuhkan penanganan secara terpadu. Temuan penelitian menunjukkan kondisi yang serupa karena persoalan pupuk, infrastruktur, lahan, dan regenerasi petani membutuhkan kewenangan serta kapasitas institusi sipil. Keterlibatan Babinsa memberikan keuntungan berupa kedekatan dengan masyarakat dan kemampuan mempercepat komunikasi. Namun, ketergantungan yang terlalu besar terhadap Babinsa dapat berpotensi melemahkan peran institusi sipil apabila tidak dikelola secara seimbang. Persoalan akses pupuk, harga komoditas, dan infrastruktur pertanian tetap membutuhkan penyelesaian melalui lembaga teknis. Karena itu, Kodim lebih tepat ditempatkan sebagai fasilitator, dinamisator, dan akselerator, bukan sebagai aktor utama permanen dalam sektor pangan.

Implikasi Strategis dan Kebaruan Penelitian

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa strategi ketahanan pangan Kodim 1302/Minahasa dapat dirumuskan sebagai integrasi antara kapabilitas militer, pemberdayaan masyarakat, dan jejaring kelembagaan. Model tersebut menempatkan Kodim sebagai aktor penghubung yang mengintegrasikan struktur Kodim, Koramil, dan Babinsa dengan kelompok tani, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat. Kontribusi penelitian terletak pada pengembangan pemahaman bahwa ketahanan pangan dapat diposisikan sebagai bagian dari strategi pertahanan berbasis wilayah. Keselarasan *Ends* berupa ketahanan wilayah, *Ways* berupa kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat, serta *Means* berupa sumber daya

teritorial menunjukkan bahwa kekuatan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan militer, tetapi juga oleh kemampuan membangun masyarakat dan wilayah yang tangguh. Dengan demikian, model keterlibatan Kodim 1302/Minahasa menunjukkan bahwa pelaksanaan OMSP dapat mendukung pembangunan kapasitas masyarakat tanpa menghilangkan peran utama institusi sipil. Ke depan, kolaborasi perlu diarahkan pada integrasi data, peningkatan kapasitas Babinsa, penguatan penyuluh pertanian, modernisasi sarana produksi, dan peningkatan keterlibatan generasi muda dalam sektor pangan. Pendekatan tersebut dapat memperkuat hubungan antara pembangunan ketahanan pangan, stabilitas wilayah, dan kesiapan menghadapi ancaman nonmiliter.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan dapat menjadi bagian dari strategi pertahanan berbasis wilayah melalui integrasi kapabilitas militer, pemberdayaan masyarakat, dan kolaborasi multiaktor. Studi pada Kodim 1302/Minahasa menunjukkan bahwa strategi tersebut dilaksanakan melalui pendampingan kelompok tani, optimalisasi lahan tidur, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, gerakan tanam padi dan jagung, dukungan distribusi pangan, serta komunikasi sosial Babinsa. Peran Babinsa menjadi penting karena mampu menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat pada tingkat desa sekaligus mempercepat koordinasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi petani. Analisis *Ends, Ways, and Means* menunjukkan adanya keterkaitan antara tujuan berupa ketahanan pangan, stabilitas wilayah, dan kesiapan operasi darat; cara berupa pembinaan teritorial, pendampingan masyarakat, optimalisasi sumber daya lokal, dan kolaborasi lintas sektor; serta sarana berupa personel Babinsa, struktur Kodim dan Koramil, jaringan sosial masyarakat, dan dukungan sarana pertanian. Kolaborasi antara Kodim, pemerintah daerah, kelompok tani, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat menjadi unsur penting dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, Kodim lebih tepat diposisikan sebagai fasilitator, dinamisor, dan akselerator yang memperkuat kapasitas masyarakat dan institusi sipil, bukan menggantikan fungsi lembaga teknis pemerintah. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus studi kasus yang hanya dilakukan pada Kodim 1302/Minahasa sehingga temuan belum dapat secara langsung digeneralisasikan pada seluruh satuan teritorial TNI AD. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi dan membandingkan beberapa satuan teritorial dengan karakteristik wilayah yang berbeda serta mengembangkan pengukuran kuantitatif terhadap kontribusi program ketahanan pangan terhadap ketahanan wilayah dan kesiapan operasi darat. Pengembangan penelitian juga dapat diarahkan pada integrasi data pangan, peningkatan kompetensi Babinsa, penguatan penyuluh pertanian, modernisasi sarana produksi, serta keterlibatan generasi muda dalam membangun ketahanan pangan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aggasi, A. & Ningtiyas, F.W. (2019). Pola komunikasi militer dalam program swasembada pangan di wilayah Koramil 1607/-01 Sumbawa. *Jurnal Tambora* 3(2):66-74.
- Ali, I.M., Yudho, L., Sianturi, D. (2022). Strategi pertahanan laut dalam menghadapi ancaman keamanan maritim di wilayah laut Indonesia. *Jurnal Education And Development*, 10 (2): 372-379.
- Alita, E.W., Lawitang, A., Anugrahan, T.F., Aditya, M.T.P. (2019). Peran Kodim 0801/Pacitan melalui Gerakan Pemuda Bertani dalam upaya menyongsong generasi milenial cinta pertanian. *Research Fair Unisri*, 3 (1):427-33.



- Angkoso, K.S. (2026). Manajemen sumber daya manusia pertahanan dalam menghadapi tantangan perang modern dan non-konvensional. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2): 2195–2204. <https://doi.org/10.56799/jceki.v5i2.15159>
- Asmara, R, A.R. & Mutiasari, R. (2012). Analisis ketahanan pangan di Kota Batu. *Jurnal Agrise*, 12 (3): 232.
- Hamdani, Julia, Abubakar, A.A., Yasier, I., Junaidi, Fahmi, N. (2024). Pemberdayaan petani milenial untuk menciptakan pertumbuhan di pedesaan melalui pemanfaatan dana desa bidang pangan di Gampong Cot Cantek Kecamatan Sakti Pidie. *Jurnal GEMBIRA: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (5): 1541–47.
- Herjito, A. & Setiawan, D. (2021). Strategi pengembangan komoditas pangan menuju ketahanan pangan nasional dengan pendekatan SWOTISM-BSC. *Rekayasa* 14 (2): 159–67. [doi:10.21107/rekayasa.v14i2.10864](https://doi.org/10.21107/rekayasa.v14i2.10864).
- Hidayat, S., & Radyawanto, A.S. (2025). Batalyon infanteri teritorial pembangunan TNI AD: Pelopor ketahanan pangan Indonesia. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 6 (5): 90-96. <https://doi.org/10.7777/jiemar.v6i5.618>
- Kamara, Laode, Imran Ismail, and Syamsiar. (2021). Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam mewujudkan swasembada pangan di Kelurahan Limpomajang Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 2 (1): 396–404.
- Kartikasari, E. (2024). Wacana Indonesia emas di artikel ilmiah 2020-2024: Tinjauan korpus. Pp. 3062–9365 in *Prosiding Seminar Nasional Kusuma III*. Vol. 2. Oktober. Menuju Indonesia Emas 2045 Yang Berdaya Saing Global.” *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara* 14 (2):120–31.
- Kurniasih, D. & Umar, M. (2022). Pengaruh implementasi kebijakan kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia terhadap efektivitas ketahanan wilayah di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28 (1): 1-18.
- Kusendarto, K. & aswir, M. (2025). Integrasi Kampung Bahari Nusantara dengan peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Operasi Militer selain Perang. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8 (11): 12814-12820. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i11.9554>
- Muda, L.H., Karim, R.M., Lorentius, Y.A., Lelana, J. (2026). Analisis sinergi pembinaan teritorial antara TNI dan pemda guna mitigasi resiko stunting dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional di Kabupaten Lombok Tengah . *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum*, 4 (2): 01–10. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v4i2.2141>
- Nabawi, F. (2016). Pelaksanaan fungsi teritorial TNI AD dalam mendukung program swasembada pangan di Kabupaten Magelang. *Journal of Public Policy and Administration Research*.
- Napitupulu, H. (2024). Sekuritisasi pangan nasional fungsi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI . *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 3703–3712. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.14806>
- Novitasari, A.A.S. & Dwijayanthi, A.A.S.A.O. (2024). Pendidikan dalam meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai tantangan dan peluang menuju Indonesia Emas 2045. *Journal Human Resources* 24/7: *Abdimas*, 2(3): 1-7.
- Purify, A., Kusman, A., Widodo, S., & Silitonga, F. (2024). Perubahan iklim dan risiko keamanan nasional: Kajian mengenai kesiapsiagaan pertahanan indonesia. *Jurnal Elektrosista*, 12(1), 1–11. <https://doi.org/10.63824/jtep.v12i1.251>
- Subagyo, A. (2022). Analisis pembinaan teritorial di Kodam III/Siliwangi dalam menghadapi hakekat ancaman. *Jurnal Academia Praja*, 5(2): 225-249. <https://doi.org/10.36859/jap.v5i2.1121>



- Suryana, A. (2014). Menuju ketahanan pangan indonesia berkelanjutan 2025: Tantangan dan penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 32 (2): 123–35.
- Susanto, J. & Putri, M.M. (2019). Peran Tentara Nasional Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat melalui pencetakan sawah baru: Studi pada Kodim 0416/Bute. *JASIORA: Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, 3 (2): 14-21. doi:10.5281/zenodo.3258016.
- Wibowo, E.T. (2020). Pembangunan ekonomi pertanian digital dalam mendukung ketahanan pangan (Studi di Kabupaten Sleman: Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26 (2): 204–28. doi:10.22146/jkn.47285.
- Wibowo, R. & Tinov, M.Y.T. (2017). Pembinaan teritorial desa di Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 4 (1): 1-15.
- Zulkifli. (2022). Komando kewilayahan dalam membantu pemerintah daerah dan implikasinya terhadap ketahanan pangan: Studi Kampung Moibaken dan Kampung Suneri di Kabupaten Biak Numfor. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28 (2):256–75.